

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN WONODADI TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WONODADI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Tahun 2023. Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2024. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2024 semoga dapat diimplementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wonodadi, Juli 2023

CAMAT WONODADI



TUNGGUL ADI WIBOWO S.STP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197708031997031005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Wonodadi secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Wonodadi membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah

tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Wonodadi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022).
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Wonodadi Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Racangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/ kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2022 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator untuk program ini adalah nilai score SAKIP yang telah diperoleh, yaitu untuk Kecamatan Wonodadi adalah 61,36 dengan predikat score adalah B.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 96,54% atau sebesar Rp. 837.000,- dari pagu anggaran Rp. 867.000,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 96,61% atau sebesar Rp. 1.147.314.440,- sebesar Rp. dari pagu anggaran Rp. 1.187.609.000,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 78,94% atau sebesar 37.490.000,- dari pagu anggaran Rp. 47.490.000,-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 99,53% atau sebesar 127.432.600 dari pagu anggaran Rp. 128.035.100,-

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 99,76 % atau sebesar Rp. 18.373.000,- dari pagu anggaran Rp. 18.416.400,-

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 99,48 % atau sebesar Rp. 82.508.835,- dari pagu anggaran Rp. 82.937.765,-
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 96,28% atau sebesar 111.449.150,- dari pagu anggaran Rp. 115.749.235,-
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan program ini adalah:
1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 8.655.000,- dengan capaian realisasi 97,57 % atau sebesar Rp. 8.445.000,-.
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 1.175.000,- dengan capaian realisasi 100 % atau sebesar Rp. 1.175.000,-.
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan dengan target kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 7.875.000,- dengan capaian realisasi 95,05% atau sebesar Rp. 7.485.000,-.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 5 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100%. Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 20.185.000,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 96,33% atau sebesar Rp. 19.445.000,-.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan program ini adalah :
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan dengan target kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 17.945.000 dengan capaian realisasi 99,25 % atau sebesar 17.810.000,-.

2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan dengan target kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2022 dengan pagu 2.330.000,- dengan capaian realisasi 100%.

- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatannya: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Indikator program ini adalah jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 10 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100 %. Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 13.625.000,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 100 %.

- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatannya : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator program adalah Jumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan capaian kinerja 100 %. Indikator kegiatan adalah jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 42.291.500,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 98,95% atau sebesar 42.043.250,-.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada

Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilhkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparaturnya yang ada.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi tahun 2021-2026 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi berdampak rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
 - c. Perlu adanya pengusulan penambahan personil pegawai di Kecamatan Wonodadi kepada Dinas Pengampu.

Rincian evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan capaian Renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sd Tahun 2022
Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Kecamatan Wonodadi

Lembar : dari

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output) /Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	RP	K		Rp	Ki
1	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah		Predikat SAKIP	A				B								0		0	#VALUE!	#DIV/0!	0		0	#VALUE!	#DIV/0!	0.00	Kecamatan Wonodadi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	10,716,621,176			100%	2,033,260,369	25%	388,667,182	25%	572,263,073	25%	527,032,558			0	1,487,962,813	0	0.731811252	0	1,487,962,813	0	6.8287E-09	1,487,962,813.00	Kecamatan Wonodadi
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	61,051,000			100%	10,000,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0	0	0.00	Kecamatan Wonodadi	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	95	61,051,000			19	10,000,000	5	4	4	6	837,000	19	837,000	1	0.0837	19	837,000	1.05263158	1.371E-07	837,000.00		837,000.00	Kecamatan Wonodadi	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	100%	8,771,784,575			100%	1,726,490,615	0	362,658,214	0	462,959,821	0	463,194,128	0	349,009,717	1	1,637,821,880	1	0.948642214	1	1,637,821,880	100	1.0815E-08	1,637,821,880.00	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	80	8,374,953,075			16	1,674,990,615	16	362,658,214	16	452,547,321	16	453,389,628	12	341,496,717	60	1,610,091,880	3.75	0.961254269	60	1,610,091,880	4.6875	1.1478E-08	1,610,091,880.00	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	45	183,153,000			9	30,000,000	9	9,240,000	9	9,240,000	9	5,300,000	36	23,780,000	4	0.792666667	36	23,780,000	8.88888889	4.3279E-07	23,780,000.00	Kecamatan Wonodadi		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	105	122,102,000			21	20,000,000	7	7	4	564,500	3	670,500	21	1,235,000	1	0.06175	21	1,235,000	0.95238095	5.0572E-08	1,235,000.00	Kecamatan Wonodadi		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	91,576,500			12	1,500,000	3	3	1,172,500	3	3	1,542,500	12	2,715,000	1	1.81	12	2,715,000	1.66666667	1.9765E-06	2,715,000.00	Kecamatan Wonodadi		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	152,627,500			100%	27,500,000	0	0	37,490,000	0	0	0	1	37,490,000	1	1.363272727	1	37,490,000	100	8.932E-07	37,490,000.00	Kecamatan Wonodadi		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	152,627,500			16	27,500,000	0	16	37,490,000	0	0	0	16	37,490,000	1	1.363272727	16	37,490,000	1.25	8.932E-07	37,490,000.00	Kecamatan Wonodadi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	633,404,125			100%	87,750,000	0	5,082,200	0	34,949,900	0	23,100,600	0	64,299,900	0.8	127,432,600	0.8	1.452223362	0.8	127,432,600	80	2.2927E-07	127,432,600.00	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	94,629,050			6	15,500,000	0	0	2	2,263,200	2	1,587,800	2	1,211,000	6	5,062,000	1	0.326580645	6	5,062,000	3.33333333	3.4512E-07	5,062,000.00	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	76,313,750			2	12,500,000	2	868,200	2	974,500	2	11,118,000	8	12,960,700	4	1.036856	8	12,960,700	40	1.3587E-06	12,960,700.00	Kecamatan Wonodadi		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	102,280,425			4	16,750,000	4	2,999,500	6	8,467,200	6	11,902,800	6	22,630,400	22	45,999,900	5.5	2.746262687	22	45,999,900	27.5	2.6856E-06	45,999,900.00	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	45,788,250			1	7,500,000	1	1,214,500	1	2,025,000	1	2,150,000	1	1,260,500	4	6,650,000	4	0.886666667	4	6,650,000	80	1.9365E-06	6,650,000.00	Kecamatan Wonodadi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	218,731,050			12	35,500,000	0	25	21,220,000	25	7,460,000	25	28,080,000	75	56,760,000	6.25	1.598873239	75	56,760,000	10.4166667	7.3772E-07	56,760,000.00	Kecamatan Wonodadi	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	97,681,600			12	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kecamatan Wonodadi

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat Sasaran	100%	126.922.500		100%	22,500,000	0		75%	13,653,000	75%	3,820,000	75%	900,000	0	18,373,000	0	0.81657777	0	18,373,000	0	6.4337E-0	18,373,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10	126.922.500		2	22,500,000	0		3	13,653,000	3	3,820,000	3	900,000	9	18,373,000	4,5	0.81657777	9	18,373,000	45	6.4337E-0	18,373,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan tepat waktu	100%	506.723.300		100%	83,000,000	25%	20,926,768	25%	15,139,852	25%	21,184,680	25%	25,297,536	0	82,548,832	0	0.99456427	0	82,548,832	0	1.9627E-0	82,548,835.0	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	103.786.700		12	17,000,000	3	3,826,768	3	2,989,852	3	2,584,680	3	4,052,544	12	13,453,840	1	0.79140235	12	13,453,840	1.66666667	7.6253E-0	13,453,840.0	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	402.936.600		12	66,000,000	3	17,100,000	3	12,150,000	3	18,600,000	3	21,244,992	12	69,094,992	1	1.04689386	12	69,094,992	1.66666667	2.5982E-0	69,094,995.0	Kecamatan Wonodadi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80%	464.108.176		80%	76,019,750	20%		25%	8,070,500	25%	15,733,150	25%	87,645,500	0	111,449,150	0	1.46605520	0	111,449,150	0	3.1589E-0	111,449,150.0	Kecamatan Wonodadi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	106.839.250		12	17,500,000	3		3	2,774,500	3	12,666,150	3	26,128,500	12	41,569,150	1	2.3753	12	41,569,150	1.66666667	2.2233E-0	41,569,150.0	Kecamatan Wonodadi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	79.366.300		6	13,000,000	0		2	5,296,000	2	2,167,000	2	8,230,000	6	15,693,000	1	1.20715384	6	15,693,000	3.33333333	1.521E-0	15,693,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	5	277.902.626		1	45,519,750	0		0		1	900,000	1	53,287,000	2	54,187,000	2	1.19040636	2	54,187,000	40	4.2835E-0	54,187,000.0	Kecamatan Wonodadi
2		Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan sampai ke Desa	Persentase Keluhan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan yang ditindaklanjuti														0		#DIV/0!	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	Kecamatan Wonodadi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan dengan predikat IKM baik	100%	318.335.100		100%	33,800,000	25%	1,977,500	25%	4,227,500	25%	1,460,000	25%	9,440,000	0	17,105,000	0	0.50606508	0	17,105,000	0	1.5897E-0	17,105,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	55	104.263.650		11	10,000,000	4		5	2,280,000	5	0	1	6,165,000	15	8,445,000	1.363636	0.844	15	8,445,000	2.47933884	8.0997E-0	8,445,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	20	104.263.650		4	10,000,000	0		4	2,280,000	4	4	4	6,165,000	12	8,445,000	3	0.844	12	8,445,000	15	8.0997E-0	8,445,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	30	104.263.650		6	10,000,000	4		1	0	1	0	0	1,175,000	6	1,175,000	1	0.117	6	1,175,000	3.33333333	1.127E-0	1,175,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	20	104.263.650		4	10,000,000	0		1	1	1	2	2	1,175,000	4	1,175,000	1	0.117	4	1,175,000	5	1.127E-0	1,175,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	20	109.807.800		4	13,800,000	4	1,977,500	4	1,947,500	4	1,460,000	4	2,100,000	16	7,485,000	4	0.54239130	16	7,485,000	20	4.9395E-0	7,485,000.0	Kecamatan Wonodadi
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan yang dilaksanakan	20	109.807.800		4	13,800,000	4	1,977,500	4	1,947,500	4	1,460,000	4	2,100,000	16	7,485,000	4	0.54239130	16	7,485,000	20	4.9395E-0	7,485,000.0	Kecamatan Wonodadi

3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi yang Baik	100%			80%									0		0	#DIV/0	0		0	#DIV/0	0.0	Kecamatan Wonodadi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25	887.878.442		5	45,654,442	5	6.800,000	1.290,000	5.020,000	6.335,000	5	19,445,000	1	0.42591693	5	19,445,000	4	4.797E-0	19,445,000.0		Kecamatan Wonodadi	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	55	887.878.442		11	45,654,442	2	6.800,000	1.290,000	5.020,000	6.335,000	2	19,445,000	0.1818182	0.42591693	2	19,445,000	0.33057851	4.797E-0	19,445,000.0		Kecamatan Wonodadi	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Penencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah persentase partisipasi masyarakat	100%	447.549.461		80%	23,467,221	1	6.800,000				0.8	6,800,000	1	0.28976588	0.8	6,800,000	100	6.4745E-0	6,800,000.0		Kecamatan Wonodadi	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sinkronisasi yang dilaksanakan	100	440.328.981		100	22,187,221	20	25	1.290,000	25	5.020,000	25	6.335,000	95	12,645,000	0.95	0.5699226	95	12,645,000	0.95	1.2943E-0	12,645,000.0	Kecamatan Wonodadi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat	100	498.004.729		20	269,305,525	2	0	3.212,500	5.571,250	5.444,500	2	14,228,250	0.1	0.05283311	2	14,228,250	0.1	1.1999E-0	14,228,250.0		Kecamatan Wonodadi	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi,koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	55	498.004.729		11	269,305,525	2		3.212,500	5.571,250	5.444,500	2	14,228,250	0.1818182	0.05283311	2	14,228,250	0.33057851	1.0609E-0	14,228,250.0		Kecamatan Wonodadi	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	50	160.164.729		10	85,255,525	0	2		4	12.900,000	4	1.500,000	10	14,400,000	1	0.16890400	10	14,400,000	2	1.0546E-0	14,400,000.0	Kecamatan Wonodadi
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	50	163.200.000		10	94,300,000	0	2		4	6.090,000	4	7.325,000	10	13,415,000	1	0.14225874	10	13,415,000	2	8.7168E-0	13,415,000.0	Kecamatan Wonodadi
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	20	174.850.000		4	89,750,000	0	3	3.212,500	3	5.571,250	4	5.444,500	10	14,228,250	2.5	0.15853203	10	14,228,250	12.5	9.0771E-0	14,228,250.0	Kecamatan Wonodadi
	Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan												0		#DIV/0!	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	Kecamatan Wonodadi	
	PROGRAM KOORDINASI KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	25	603.247.459		5	80,126,885	5	2.585,000	5	7.465,000	5	0	7.760,000	15	17,810,000	3	0.22227255	15	17,810,000	12	3.6846E-0	17,810,000.0	Kecamatan Wonodadi
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	20	603.247.459		4	59,662,885	4	2.585,000	4	7.465,000	4	0	7.760,000	12	17,810,000	3	0.2985105	12	17,810,000	15	4.9484E-0	17,810,000.0	Kecamatan Wonodadi
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	203.932.715		1	29,662,885	2	935,000	4	4.350,000	4	4	5.300,000	14	10,585,000	14	0.3568432	14	10,585,000	280	1.7498E-0	10,585,000.0	Kecamatan Wonodadi
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	55	399.314.744		11	30,000,000	3	1.650,000	2	3.115,000	2		2.460,000	7	7,225,000	0.6363636	0.24083333	7	7,225,000	1.15702475	6.0312E-0	7,225,000.0	Kecamatan Wonodadi
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan	5	216.660.692		1	20,463,965	1		1	0	1	0	2.330,000	3	2,330,000	3	0.11385867	3	2,330,000	60	5.2552E-0	2,330,000.0	Kecamatan Wonodadi
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	55	216.660.692		11	20,463,965	1		2	2		6	2.330,000	11	2,330,000	1	0.11385867	11	2,330,000	1.81818182	5.2552E-0	2,330,000.0	Kecamatan Wonodadi

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10	196.890,388		10	114,776,486	2		3	1,947,500	3	5,760,000	2	5,857,500	10	13,565,000	1	0.118186228	10	13,565,000	10	6.0026E-08	13,565,000.00	Kecamatan Wonodadi
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	20	196.890,388		4	114,776,486	1		1	1,947,500	1	5,760,000	1	5,857,500	4	13,565,000	1	0.118186228	4	13,565,000	5	6.0026E-08	13,565,000.00	Kecamatan Wonodadi
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	5	196.890,388		1	114,776,486	1		1	1,947,500	1	5,760,000	1	5,857,500	4	13,565,000	4	0.118186228	4	13,565,000	80	6.0026E-08	13,565,000.00	Kecamatan Wonodadi

Wonodadi, Januari 2023

CAMAT WONODADI



TUNGGUL ADLWIBOWO, S.STP. MM
 Pembina Tk I
 NIP. 197708031997031005

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, ditetapkan tugas kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan

Sedangkan fungsi kecamatan adalah:

- a. Menyusun kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik;
- f. Penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan ;
- g. Pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan tersebut, Kecamatan Wonodadi menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah. Dikarenakan kecamatan merupakan perangkat daerah yang tidak mampu pelayanan dasar sehingga indikator kinerjanya tidak terdapat dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. IKU Kecamatan Wonodadi sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penilaian IKM diatur dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ada 9 unsur yang dinilai yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana-prasarana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Survei Kepuasan Masyarakat di

Kecamatan Wonodadi dilaksanakan setahun dua kali. Target hasil SKM tahun 2022 adalah Sangat Baik.

2. Persentase Peningkatan

- a. Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
- b. Persentase peningkatan desa/kelurahan dengan administrasi berkualitas baik

Target kinerja IKU pada tahun 2022 sesuai dengan Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Wonodadi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Standart nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indikator tujuan dan sasaran :											
	Indeks Kepuasan Masyarakat				83,44	85,24	87,14					
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Indeks Kesalehan Sosial				82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)					
	Persentase penurunan pelanggaran trantibum di Wilayah Kecamatan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah				B	B	BB		B			
	Persentase desa mandiri di kecamatan				0%	9%	18%		9%	18%		
	Nilai SAKIP				65	69	75		69,74	69	75	
	Persentase desa yang memiliki administrasi baik				80%	85%	90%		80%	85%	90%	
	Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik				11	11	11		11	11	11	
2	Indikator Program dan Kegiatan :											
2.1	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik				100	100	100		100	100	100	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan				4	4	4		4	4	4	
	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan				4	4	4		4	4	4	

2.2	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan				5	5	5		5	5	5	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan				6	6	6		6	6	6	
	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan				5	5	5		5	5	5	
2.3	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan				10	10	10		10	10	10	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan				6	6	6		6	6	6	
2.4	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah				100	100	100		100	100	100	
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan				100	100	100		100	100	100	
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel				100	100	100		100	100	100	
	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	100	100		100	100	100	
	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel				100	100	100		100	100	100	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran				100	100	100		100	100	100	
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100	100	100		100	100	100	
2.5	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan				5	5	5		5	5	5	

	Kelurahan											
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan				11	11	11		11	11	11	
	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat				20	20	20		24	20	20	
	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan				22	22	22		22	22	22	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat disimpulkan tugas kecamatan adalah melaksanakan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari uraian di atas tersebut dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Wonodadi. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Wonodadi. Dari hasil analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan sekitar 25 orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 9 (Sembilan) orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang kecil.

Beberapa program kegiatan telah disesuaikan sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja maupun output dan output spesifiknya.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Wonodadi yaitu:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Capaian kinerja tugas pokok dan fungsi kecamatan ini telah mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yaitu *Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur* yang dijabarkan dalam misi ke-4 dan misi ke-6 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan. Kecamatan merupakan OPD yang tidak menerapkan pencapaian SPM karena merupakan OPD sebagai fungsi penunjang bidang pemerintahan urusan kewilayahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public
7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Disamping mengacu pada RPJMN Nasional, Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan 2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong.

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka Isu-isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Blitar sebagai berikut:

- 1) Pentingnya pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal.
- 2) Tantangan untuk memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi.
- 3) Pentingnya percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
- 4) Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan

meningkatkan PAD.

- 5) Pentingnya keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.
- 6) Mengakselerasi pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar.
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana.
- 8) Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih.
- 9) Pentingnya mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.
- 10) Keberpihakan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difabel dan penyandang kesejahteraan social.
- 11) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
- 12) Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	915,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	1,112,442	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	1,682,665,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	1,681,226,600	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	82,680,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98,440,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	94,744,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	108,464,901	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	45,577,900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	83,016,789	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	92,069,870	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	105,213,376	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	272,929,630	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonodadi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	129,338,600	
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	11 Kali	5,880,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	4 kali	5,293,040	
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Layanan yang Dilaksanakan	6 layanan	2,940,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Layanan yang Dilaksanakan	90%	5,293,040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	6 kali	2,940,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	4 kali	5,293,040	
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	11 kali	12,190,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	11 kali	16,763,240	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	6 kali	10,323,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	11 kali	121,615,200	
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan Perda dan Perkada yang Dilakukan	5 kali	3,648,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	4 kali	12,299,376	
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Diselenggarakan	6 kali	16,041,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan Perda dan Perkada yang Dilakukan	1 kali	5,703,296	
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Rekomendasi, Koordinasi dan Pengawasan yang Dilaksanakan	22 kali	40,772,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Koordinasi yang Diselenggarakan	4 kali	64,782,160	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
16						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonodadi	Jumlah Rekomendasi, Koordinasi dan Pengawasan yang Dilaksanakan	11 kali	72,460,400	

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut adalah usulan Program dan kegiatan yang disetujui pada Musrenbang tahun 2023

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Blitar

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	PP1: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan Perluasan Pasar	Program Pengembangan UMKM	Pelatihan Produksi Olahan Makanan/Minuman	Pelatihan Usaha UMKM bagi anak-anak muda yang kurang bisa berkembang	Desa Kunir Kec Wonodadi	Peserta dari 11 Desa se Kecamatan Wonodadi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha Tani yang ada diselatan proyek ke timur menuju ke Dsn Jambewangi karena amat sangat sulit dilalui sehingga sering menimbulkan kecelakaan	Dsn Bendolowo s/d Dsn Jambewangi, Desa Tawangrejo Kec. Kab. Blitar	1.900 m	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha Tani untuk memperlancar pengangkutan hasil tani	Ds.Kolomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar, Kab. Blitar	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Handtraktor rotary	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Handtraktor Rotary	Dusun Krajan RT 03 RW 05 Desa Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar	6 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Usaha Tani untuk memperlancar pengangkutan hasil tani	DESA JATEN, Kec. Wonodadi Kab. Blitar	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	PP2 : Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelatihan Kapasitas Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Keterampilan Akupresur	Pelatihan Kelompok Asman Toga	Dusun Ngrawan RT 02 RW 02, Kab. Blitar	Peserta dari 11 Desa se Kecamatan Wonodadi	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Hibah Kelompok Kebudayaan dan Kesenian	Pengadaan alat kesenian untuk kelompok kesenian	Desa pikatan, Kab. Blitar	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Hibah Kelompok Kebudayaan dan Kesenian	Pengadaan alat kesenian untuk kelompok kesenian	Desa Wonodadi, Kab. Blitar	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Pelatihan Kerja untuk anak muda karena banyaknya anak muda yang belum memiliki pekerjaan tetap karena minim ketrampilan	Dusun Krajan Rt 04 Rw 04 Desa Kunir, Kab. Blitar	Peserta dari 11 Desa se Kecamatan Wonodadi	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Bintek Wirausaha Muda Pemula	Bintek Wirausaha Muda Pemula	desa pikatan, Kab. Blitar	Peserta dari 11 Desa se Kecamatan Wonodadi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	PP3 : Penguatan Infrastruktur dan Sarana - Prasarana Penunjang Sektor - sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Hidup dan Ketahanan Bencana	Pengelolaan Persampahan	Sarana Penunjang Kebersihan Lingkungan (Motor Roda 3 Pengangkut Sampah)	Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	Dsn. Salam RT 01 RW 01, Kab. Blitar	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Perbaikan Jalan rusak berlubang karena tergenang air di musim penghujan sehingga mengakibatkan kecelakaan	RT.005 RW.001 Desa Kaliboto, Kec Wonodadi Kab. Blitar	100 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan	Pelebaran jalan	Dusun Kebonagung RT 003 RW 001, RT 004 RW 001, RT 001 RW 003, RT 004 RW 003, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Perbaikan Jalan karena rusak dan berlubang menyebabkan sering terjadi kecelakaan saat hujan dan malam hari	Dusun Setinggil Rt 03/01 Ds. Gandekan Kec.	1,65 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Volume	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Wonodadi Kab. Blitar, Kab. Blitar		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Perbaikan Jalan karena rusak dan berlubang menyebabkan sering terjadi kecelakaan	dusun wonodadi dan dusun bakalan sampai ke dusun seduri, Kec. Wonodadi Kab. Blitar	1.000 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	PP4 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Peningkatan Kapasitas BPD	desa pikatan, Kab. Blitar	Peserta dari 11 Desa se Kecamatan Wonodadi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa		Peningkatan Kapasitas Kades	Peningkatan Kapasitas Kades	DESA REJOSARI, Kab. Blitar	Peserta dari 11 Desa se Kecamatan Wonodadi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW)	DESA REJOSARI, Kab. Blitar	Peserta dari 11 Desa se Kecamatan Wonodadi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Pengadaan Internet Desa	Pengadaan Internet Desa	Dsn. Salam RT 02 RW 01, Kab. Blitar	1 Paket	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERA

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain:

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan:
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010 – 2014 dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung padamenurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan pada Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat;
2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa

Rencana Kerja 2024 Kecamatan Wonodadi

3. Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemenuhan hak – hak azasi manusia

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wonodadi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah:

1. Menciptakan pelayanan Publik yang mudah dan dan cepat untuk kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kantor pendukung pelayanan
3. Meningkatnya ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah
5. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan dukungan stakeholder

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wonodadi maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Wonodadi adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Wonodadi agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan Wonodadi. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Wonodadi melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan public sehingga dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Wonodadi pada tahun 2024 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu “***Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur***”. Di Tahun 2024 pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terdapat 6 (enam) Program dan 18 (Delapan Belas) Kegiatan.

Rencana Kerja 2024 Kecamatan Wonodadi

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Program yang ditetapkan oleh Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari uraian di atas di atas maka rumusan program daerah pada tahun 2024 ialah

1. Peningkatan fasilitas pelayanan di kecamatan
2. Peningkatan Optimalisasi teknologi informasi guna mendukung proses pelaksanaan tugas.

Rencana Kerja 2024 Kecamatan Wonodadi

Berikut adalah tabel rencana program dan kegiatan Kecamatan Wonodadi Tahun 2024

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.879.120,00							72.680.200,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.293.040,00							24.067.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	5.293.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		24.067.500,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						5.293.040,00							24.067.500,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	5.293.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		24.067.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.293.040,00							24.545.200,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	5.293.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		24.545.200,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						138.378.440,00							215.133.500,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16.763.240,00							145.133.500,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	-	11.172.160,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		73.341.150,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Dokumen	-	5.591.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100 Dokumen		71.792.350,00

7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					121.615.200,00						70.000.000,00
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	55 Keluarga	-	4.793.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	55 Keluarga	14.000.000,00
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	55 Keluarga	-	4.793.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	55 Keluarga	14.000.000,00
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	55 Keluarga	-	4.793.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	55 Keluarga	14.000.000,00
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	55 Keluarga	-	102.443.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	55 Keluarga	14.000.000,00
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	55 Keluarga	-	4.793.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	55 Keluarga	14.000.000,00

7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	-	3.586.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	5.400.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	-	11 Dokumen	-	5.586.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 Dokumen	3.200.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	11 Dokumen	-	7.293.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11 Dokumen	3.155.000,00
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	11 Dokumen	-	6.303.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11 Dokumen	4.911.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Dokumen	-	18.096.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Dokumen	21.600.000,00
X					NON URUSAN								1.838.782.232,00					1.876.663.402,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.838.782.232,00					1.876.663.402,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.838.782.232,00					1.876.663.402,00
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.681.226.600,00					1.734.885.615,00
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	16 Orang/bulan	-	1.661.603.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.674.990.615,00
X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	19 Dokumen	-	18.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19 Dokumen	39.930.000,00

X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	19 Laporan	-	843.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19.965.000,00
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								98.440.000,00				33.275.000,00
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	16 Orang	-	98.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	33.275.000,00
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								5.889.532,00				30.613.000,00
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	4.315.347,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.630.500,00
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Blitar, Wonodadi, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	1.574.185,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.982.500,00
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53.226.100,00				77.889.787,00
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	11.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	17.303.000,00
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	42.146.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.586.787,00
TOTAL													2.516.315.500,00			2.753.162.052,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mengelola 6 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 merupakan program, kegiatan dan subkegiatan baru sesuai dengan PMDN nomor 90 tahun 2019. Total pagu anggaran 2024 senilai Rp. 2.516.315.500,00

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.206.812.708,- dengan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 1.112,442,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 1.681.226.600,-
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 98.440.000,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 108.464.901,00
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp 83.016.789,-
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 105.213.376,-
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 129.338.600,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Rp 15.879.120,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan pagu anggaran Rp 5.293.040,-
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 5.293.040,-
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan pagu anggaran Rp 5.293.040,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu Rp 138.378.440,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp 16.763.240,-
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp 121.615.200,-

Rencana Kerja 2024 Kecamatan Wonodadi

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu Rp 18.002.672,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp 12.299.376,-
 - b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pagu anggaran Rp 5.703.296,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu Rp 64.782.160,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah dengan pagu Rp. 64.782.160,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu Rp 72.460.400,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 72.460.400,-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Kecamatan Wonodadi dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada saat penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran Kecamatan Wonodadi tidak sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Wonodadi, 26 Juli 2023

CAMAT WONODADI


TUNGGUL ADI WIBOWO S.STP.MM

Pembina Tk I

NIP. 19770803 199703 1 005